

PARTISIPATIF PLANNING PADA PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PANTAI DALEGAN GRESIK

Banun Prabawanti

Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
banunprabawanti363@gmail.com

Bambang Kusbandrijo

Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
bk.untag@gmail.com

Supri Hartono

Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
suprihartono@untag-sby.ac

ABSTRAK

Peneliti ini membahas Partisipatif Planning Pada Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Dalegan Gresik, Pantai Dalegan menawarkan studi kasus yang sempurna tentang Pariwisata Berbasis Masyarakat, di mana objek wisata dikelola langsung oleh Pemerintah Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), bukan oleh investor swasta atau pemerintah daerah tingkat kabupaten. Meneliti model ini penting untuk memahami bagaimana aset wisata dapat dikelola secara mandiri oleh desa. Peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi di Wisata Pantai Dalegan Gresik. Hasil peneliti menunjukkan bahwa Partisipatif Planning pada Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Dalegan Gresik dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengembangan kawasan wisata masih belum sepenuhnya berjalan secara partisipatif, berdasarkan variabel teori Sherry Arnstein, meskipun telah menunjukkan beberapa upaya melibatkan masyarakat. Bentuk partisipasi yang muncul lebih banyak berada pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan, sementara keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan awal, pengambilan keputusan, dan evaluasi masih rendah. Pengelola pantai, pemerintah desa, dan pelaku usaha lokal sebenarnya telah memiliki komitmen untuk melibatkan masyarakat, namun mekanisme partisipasi yang terstruktur belum sepenuhnya diterapkan.

Kata Kunci: *Partisipatif Planning, Perencanaan Partisipatif, Pengembangan Wisata.*

ABSTRACT

This research discusses Participatory Planning in the Development of the Dalegan Beach Tourism Area in Gresik. Dalegan Beach offers a perfect case study of Community-Based Tourism, where the tourist attraction is managed directly by the Village Government (BUMDes) and the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), rather than by private investors or the district government. Examining this model is important to understand how tourism assets can be managed independently by the village. This researcher used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, documentation, and observation at Dalegan Grsik Beach Tourism. The research results show that Participatory Planning in the Development of Dalegan Gresik Beach Tourism Area can be concluded that the planning process for developing tourism areas has not yet been fully implemented in a participatory manner, based on Sherry Arnstein's theory variables, although it has shown some efforts to involve the community. The form of participation that appears is more at the implementation and utilization stages, while community involvement in the initial planning, decision-making, and evaluation stages is still low. Beach managers, village governments, and local business actors have actually had a commitment to involve the community, but structured participation mechanisms have not been fully implemented.

Keywords: *Participatory Planning, Participatory Planning, Tourism Development,*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama pada sektor pariwisata. Salah satu potensi yang terus berkembang adalah wisata pantai. Pantai menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara karena keindahan alam dan beragam aktivitas yang bisa dilakukan. Salah satu kawasan yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata adalah Pantai Pasir Putih di Desa Dalegan. Pantai ini dikenal dengan panorama alamnya yang indah dan berpasir putih, sehingga memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di daerah tersebut.

Namun, meskipun memiliki potensi alam yang memadai, pengembangan Pantai Pasir Putih Desa Dalegan belum maksimal. Infrastruktur pendukung seperti akses jalan, fasilitas umum, serta promosi pariwisata masih terbatas. Kurangnya perencanaan yang matang dan investasi dari sektor ekonomi membuat kawasan ini belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan berbasis economic development atau pengembangan ekonomi yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta memaksimalkan potensi alam yang ada dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pengembangan kawasan wisata yang berorientasi pada pembangunan ekonomi akan memberikan manfaat jangka panjang tidak hanya bagi pengelola wisata, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya peningkatan infrastruktur dan fasilitas wisata, akan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang berdampak pada naiknya pendapatan lokal. Selain itu,

pengembangan berbasis ekonomi juga dapat mendorong lahirnya usaha-usaha baru, seperti penyedia jasa penginapan, kuliner, dan kerajinan tangan, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Melalui pendekatan ini, pengembangan Pantai Pasir Putih Desa Dalegan diharapkan tidak hanya meningkatkan sektor pariwisata, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Dengan demikian, perencanaan yang tepat serta kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Partisipatif planning masyarakat dalam tenaga merupakan sumbangsih berupa tenaga atau fisik yang diperlukan dalam pengembangan desa wisata. Partisipatif planning ini dapat dilihat dari kesiapan secara fisik dalam mempersiapkan area kunjungan, pemandu wisata, penyediaan sarana prasarana dan penyediaan peralatan penunjang kegiatan. Pengembangan pariwisata menjadi pilihan penting bagi suatu Negara atau daerah karena multifek yang timbulkan oleh kegiatan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi merupakan dampak utama yang dicirikan oleh terbukanya lapangan kerja, stimulasi investasi sehingga berkembang produk wisata baik barang maupun jasa sehingga pariwisata terus berkembang.

Dalam pelaksanaannya haruslah mempertimbangkan aspek kemanfaatan ini terlihat dari semakin banyaknya anggota masyarakat yang terlibat dan berpartisipasi aktif serta mendapat kemanfaatan secara finansial dengan adanya desa wisata. Pariwisata merupakan salah satu bidang potensial dalam hal pembangunan sebuah negara, hal ini dikarenakan pariwisata dianggap mampu memberikan dampak positif sebagai penggerak kegiatan ekonomi rakyat. Dampak positif yang paling terasa adalah pariwisata berperan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam hal pembangunan disuatu daerah.

Adapun partisipatif planning masyarakat menjadi salah satu yang telah mengemuka saat ini pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipatif planning masyarakat telah memiliki salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik, (Hosnan, 2007:36). Keberadaan partisipatif planning masyarakat menurut Budiarjo dalam Hosnan (2007) pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya.

Perencanaan partisipatif planning yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perencanaan pembangunan dengan pelibatan masyarakat dilakukan dengan mekanisme musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga di tingkat provinsi. Penyelenggaraan Musrenbang.

WPP yaitu singakatan dari (Wisata Pasir Putih) terletak di wilayah barat Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Panceng yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan. Jarak WPP dari Gresik kota berjarak sekitar 45km. WPP sudah dapat menarik pengunjung namun upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini dirasakan masih kurang dan masih dalam tahap proses pembangunan selain itu prospek pariwisata dimasa mendatang juga perlu

diperhatikan karena peluang serta sumberdaya alam yang terdapat di WPP harus di manfaatkan secara optimal dan dijaga sebaik mungkin. Adapun obyek dan daya tarik wisata yang menjadikan daya tarik minat masyarakat di wilayah Gresik sebagai potensi untuk dikembangkan, hal ini berdasarkan urutan objek wisata yang paling unggul dalam segi pengunjung terbanyak antara lain, wisata religi yang meliputi ziarah pemakaman wali-wali, wisata alam yang meliputi pantai dan wisata budaya yang meliputi situs dari jaman purbakala berupa Goa dan petilasan (Bahar, 2016).

Dalam mencapai tujuan yaitu, mewujudkan Wisata Pasir Putih sebagai tujuan wisata yang aman, nyaman dan menarik serta memiliki daya saing yang tinggi untuk dikunjungi sebagai Destinasi Wisata terkemuka di Kabupaten Gresik. Dinas pengelolah Pariwisata, dan seluruh anggota pokdarwis di desa Dalegan sudah mempersiapkan strategi-strategi khusus guna untuk pengembangan Wisata Pasir Putih kedepannya agar bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi dalam hal Sektor Pariwisata dalam peningkatan kunjungan wisata di Desa Dalegan Panceng Gresik.

Dalam upaya pengembangan wisata juga diperlukan arahan untuk mengetahui prospek dan upaya pengembangan yang direncanakan pada masa yang akan datang, sehingga objek Wisata Pasir Putih menjadi objek wisata unggulan yang akan menarik banyak pengunjung baik lokal maupun nasional bahkan sampai mancanegara dan dapat menjadi objek pendukung bagi objek-objek wisata lain yang sudah berkembang di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipatif Planinning Pada Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Dalegan Gresik”.

Seiring dengan perkembangan zaman Kabupaten Gresik mulai berkembang pesat. Salah satunya pada sektor wisatanya yang ada di Kecamatan Panceng biasanya dikenal dengan sebutan Pantai wisata Dalegan atau Pantai Pasir Putih. Hal ini dinyatakan dalam (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, Tentang Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017)“ meninjau dari banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Gresik cenderung semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini berdasarkan sasaran target yang di kelompokkan menjadi dua jenis wisatawan yaitu indikator kinerja persentase kunjungan wisata Mancanegara yang memiliki target 44 persen dengan capaian realisasi 99% dan persentase kunjungan wisata dalam Negeri memiliki target 3% dengan capaian realisasi 9%”.

Dari adanya uraian penjelasan persentase pengunjung tersebut, obyek wisata alam yang ada di Dalegan inilah yang menjadi salah satu favorit wisatawan setiap berkunjung ke Gresik, namun fasilitas penunjangnya masih banyak yang kurang lengkap. Oleh karena itu obyek wisata ini dianggap penting oleh Dinas Kabupaten Gresik untuk dikembangkan lagi sarana dan prasaranaanya sehingga dapat menambah daya tarik minat wisatawan untuk berkunjung dan dapat dijadikan sebagai wisata alam yang menarik di Gresik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Partisipatif Planning

Partisipatif sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “participation” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikutsertakan atau mengambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.

Sehubungan dengan partisipatif masyarakat dalam pembangunan, partisipatif merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipatif tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia “partisipatif” berarti hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan.

Teori Partisipatif

Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) “Teori Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pemngembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang teteapi kurang dipraktekkkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan perencanaan partisipatif dalam pengembangan kawasan pesisir di Gresik, dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali perspektif masyarakat lokal, pemangku kepentingan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan partisipatif. Metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang penerapan perencanaan partisipatif dalam pengembangan kawasan pesisir di Gresik serta dampaknya terhadap ekonomi lokal. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Muurut Wigati Abdullah (2008: 63), penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu masalah atau gejala sosial dengan memberikan gambaran menyeluruh atas proses yang terjadi pada gejala yang diamati. Di samping itu, penelitian kualitatif disebut juga dengan deskripsi.

Menurut Suryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Menurut Moleong (2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggali informasi secara mendalam, serta terbuka terhadap segala tanggapan dan bukan hanya jawaban ya atau tidak. Penelitian ini mencoba untuk meminta orang-orang untuk mengungkapkan berbagai pikiran mereka tentang suatu topik tanpa memberi mereka banyak arahan atau pedoman bagaimana harus berkata apa.

Menurut Nugrahani (2008) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai

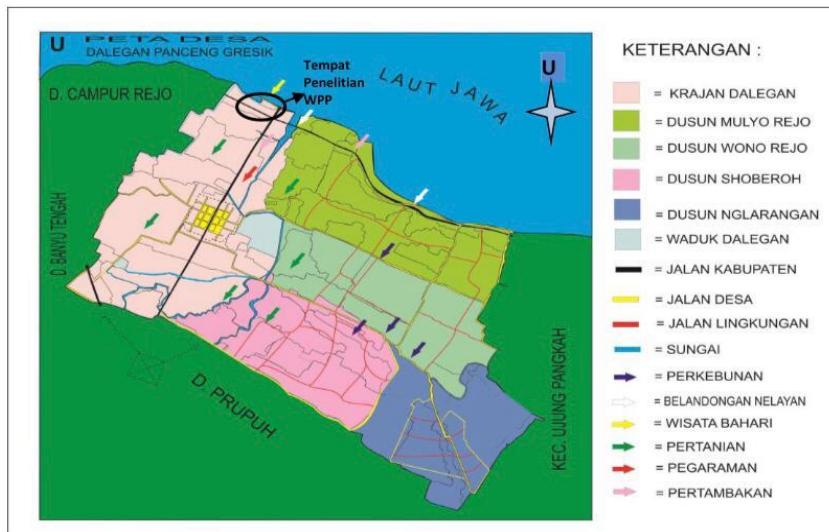
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Pantai ini terletak di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dari Kota Gresik, pantai ini berjarak sekitar 40 kilometer. Pantai Dalegan merupakan salah satu objek wisata pantai favorit di daerah gresik. Pantai yang landai dan berpasir putih ini memiliki luas sekitar 2,5 hektar. Ombak di pantai ini tidak terlalu besar dan relative stabil, sehingga sangat cocok untuk bermain air, bermain pasir di tepi pantai dan berenang.

Untuk menuju pantai ini dari Kota Gresik terus ke Sidayu, terus melewati hutan jati Panceng ada papan penunjuk arah yang menunjukkan wisata Pantai Dalegan, kemudian terdapat jalan arteri masuk ke utara sekitar 1 kilometer.



Gambar 1. Peta Wisata Pantai Dalegan Gresik

Sumber: Google.com

Secara geografis Kecamatan Panceng terletak pada posisi antara 10°LS- 8°LS dan 112°BT - 133°BT. Desa Dalegan terletak pada ketinggian antara 5-10 meter di atas ketinggian permukaan laut. Suhu minimum berkisar 22-28°C dan suhu maksimum antara 25-35°C dengan rata-rata hujan 830 mm pertahun. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Gresik mengikuti perubahan putaran 2 iklim yaitu musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus, dan November curah hujan relatif rendah.

a. Struktur Organisasi

Wisata pantai dalegan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalegan, dengan model kepengurusan pengelolaan dan pengembangan Wisata pantai dalegan. Pelaksanaan teknis yang berkenaan langsung dengan wisata pantai

dalegan oleh pemerintah desa telah dibentuk badan tersendiri yang mengurus dan dikelola oleh masyarakat setempat dengan Surat Keputusan (SK) satu tahun. Pengelola teknis meliputi ketua, sekretaris, bendahara, penjaga loket, keamanan, penjaga malam, dan kebersihan. Dengan demikian badan pengelola tersebut wajib memberikan laporan pada pemerintah desa dalam tiap periode.

Struktur organisasi petugas lapang sudah dibentuk yang menunjukkan pembagian tugas pada masing-masing pengelola teknis.

Gambaran Umum Balai Desa Dalegan



Gambar 3. Balai Desa Dalegan

Sumber: Google.com

Keadaan topografis Desa Dalegan terletak pada ketinggian antara 5-10 meter di atas ketinggian permukaan laut.. Suhu minimum berkisar 22-28°C dan suhu maksimum antara 25-35°C dengan rata-rata hujan 830 mm pertahun. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Gresik mengikuti perubahan putaran 2 iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Desa Dalegan ini memiliki luas 772,281 Ha. Secara geografis Desa Dalegan terletak antara 1120 27' 807" - 112028' 931" Bujur Timur dan 60 53' 557" - 60 54' 444" Lintang Selatan. Desa Dalegan terletak di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa - desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan laut jawa. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa campurejo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Prupuh sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Campurejo dan Cangaan Kecamatan Ujungpangkah. Desa Dalegan memiliki 4 Dusun yakni Dusun Mulyorejo, Dusun Wonorejo, Dusun Shoberoh dan Dusun Larangan. Jarak tempuh Desa Dalegan ke Ibu Kota Kecamatan adalah +1,5 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah + 45 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam. Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi adalah 65 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam

Pemerintahan Desa Dalegan menjadi faktor pendukung kesuksesan pengembangan dan pengelolaan potensi-potensi desa wisata desa dalegan. Pemerintahan Desa Dalegan cukup supportif dengan pengelolaan dan pengembangan potensi-potensi yang ada di Desa Dalegan, seperti pembangunan

fasilitas-fasilitas yang ada di Pantai Dalegan untuk menambah daya tarik.

- a. Pemerintah Desa Dalegan
 - 1. Kepala desa
 - 2. Sekretaris desa
 - 3. Kepala urusan keuangan
 - 4. Kepala urusan tata usaha dan umum
 - 5. Kepala urusan perencanaan
 - 6. Kasih pemerintah
 - 7. Kasih kesejahteraan
 - 8. Kasih pelayanan
- b. Visi dan Misi
 - 1. Visi
 - Terwujudnya Desa Dalegan yang Demokratis, Aspiratif dan Agamis Menuju Desa Pendidikan dan Wisata.
 - 2. Misi
 - 1) Menyelenggarakan tugas pemerintahan sesuai dengan tuntutan pemerintah dan kebutuhan masyarakat
 - 2) Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran islam secara kaffah
 - 3) Menumbuhkan, mengembangkan dan mengarahkan minat, bakat masyarakat
 - 4) Menciptakan desa dagan menjadi desa yang Damai, Aman, Giat, Aktif dan Nasionalis

Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Biasanya bentuknya menggunakan teks narasi. (Setyawan et al., 2021). Dapat dijabarkan bahwa Penyajian Data merupakan proses menyusun informasi secara sistematis guna membantu dalam menarik kesimpulan serta menentukan langkah yang akan diambil. Tujuan utama dari penyajian ini adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang disampaikan. Beberapa metode yang biasa digunakan dalam penyajian data antara lain adalah diagram, tabel, dan grafik. Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari istansi yang terkait tetang wisata pantai dalegan gresik ini.

Desa wisata Dalegan adalah desa wisata yang memiliki berbagai potensi, seperti alam pantai dengan pasir putih yang lembut dan ombak yang tenang, selain itu terdapat wisata hutan mangrove di sepanjang sungai. Penduduk di Desa Dalegan sendiri di dominasi oleh warga lokal, namun tidak sedikit juga yang dari pendatang yang pada akhirnya menetap di Desa Dalegan. Masyarakat desa dalegan adalah masyarakat homogeny dan suka saling berbaur antara warga satu dengan warga lainya. Untuk mata pencarian masyarakat, penduduk desa Dalegan kebanyakan berprofesi sebagai pedagang, selain pedagang banyak juga yang berprofesi sebagai,nelayan, petani, dan buru pabrik.

Pengelolaan objek wisata Pantai Dalegan dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Desa (melalui BUMDes) dan masyarakat lokal (melalui Pokdarwis dan peda gang). Adapun hasil wawancara serta data penelitian yang dilakukan peneliti

sebagai berikut:

1) Tidak Partisipatif

a) Manipulasi

Hasil wawancara terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan partisipatif pantai dalegan pada tahapan non partisipasi pada anak tangga pertama Manipulasi. 100 % responden tidak setuju bila dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan partisipatif planning tidak ada musyawarah, semuanya sudah ditentukan pemerintah desa. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan partisipatif planning pada Kawasan pantai dalegan dilaksanakan dengan musyawarah atau dialog dua arah antara pemerintahan desa dengan masyarakat.

Arnstein mendefinisikan manipulasi sebagai relatif tidak adanya komunikasi antara pemerintahan desa dengan masyarakat, semua kebijakan perencanaan sudah ditentukan oleh pemerintah desa, masyarakat datang hanya untuk menyetujui apa yang sudah ditetapkan pemerintah desa saja, dimana hal ini akan berdampak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pemerintah. Dari jawaban responden terkait komunikasi antara pemerintahan desa dengan masyarakat dalam forum partisipatif, jelas terlihat komunikasi yang dibangun oleh pihak Pemerintahan desa relatif bagus. Hal ini menunjukkan partisipatif desa dalegan tidak hanya sekedar manipulasi saja, tetapi benar-benar terdapat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Dikaitkan dengan wawancara beberapa pihak. Menurut Bapak Moh. Qolib selaku kepala desa dalegan:

“Desa memastikan adanya distribusi pendapatan kembali ke masyarakat, yang menjadi pilar keberlanjutan dan dukungan publik terhadap wisata. Pihak desa menggunakan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) sebagai wadah resmi dan formal untuk mengundang perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, dan kelompok kepentingan (seperti Pokdarwis dan masyarakat) untuk merumuskan rencana pembangunan kawasan Pantai Dalegan. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam menjaga kelestarian, yang pada akhirnya akan berdampak pada perkembangan aspek sosial dan ekonomi desa.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mafudi selaku kordinator kelompok sadar wisata (POKDARWIS):

“Kami selalu memulai dengan Musyawarah atau Temu Anggota Rutin. Di sana, semua anggota Pokdarwis dan perwakilan tokoh masyarakat kami undang. Disana kami membuat semacam daftar keluhan, misalnya masalah sampah atau akses jalan yang rusak. Kalau masalah kendala pasti ada mbak... Yang paling utama adalah masalah waktu dan kesibukan masyarakat. Tidak semua orang bisa hadir dalam pertemuan resmi. Untuk mengatasi ini, kami menggunakan grup media sosial sebagai wadah sharing informasi dan masukan informal. Selain itu, kendala dana juga sering membatasi pelaksanaan ide-ide besar yang sudah direncanakan secara partisipatif.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Munafi' selaku pedagang makanan di Kawasan wisata pantai :

“Ya, saya pernah ikut. Saya diundang oleh ketua kelompok pedagang di sini, kemudian ketua itu yang mendapatkan undangan dari pihak bumdes saat ada pertemuan untuk penataan lokasi. Masalah utama kami itu penetapan jualan yang tidak pasti jadi setiap tahunnya di sini itu di roling untuk bergantian sama pedagang lain. Kami juga sudah dilibatkan dalam kegiatan bersih-bersih rutin dan ada pelatihan dari bumdes tentang kebersihan. Jadi, kami merasa lebih bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini. Harapan saya mbak.. Adanya dukungan atau panduan untuk membangun warung yang seragam dan rapi (estetis), yang secara visual menarik pengunjung dan tidak merusak keindahan pantai.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Amawati selaku pedagang Baju dan Mainan di Kawasan wisata pantai:

“Masalah yang saya hadapi di sini kurang lebih sama seperti pedagang lain, harapan saya juga ingin jadi pedagang tetap di sini mbak soalnya pendapatan juga tidak tentu untuk persewaan juga, dan saya juga ingin Kawasan ini lebih di perbaiki lagi, memang Kawasan ini sudah ada pembangunan sedikit-sedikit cotonya penambahan gazebo, memperluas lahan parkir dan masih banyak lainnya mbak.”

Dalam beberapa temuan lapangan, warga dan pedagang kadang hanya diberitahu keputusan yang sudah ditetapkan oleh pengelola atau pemerintah desa tanpa proses dialog yang sejajar. Masyarakat sering dianggap sebagai penerima informasi dan diminta mengikuti aturan yang sudah dibuat, bukan sebagai pihak yang dilibatkan sejak awal. Bentuk manipulasi juga tampak ketika kegiatan partisipasi yang dibuat hanya bertujuan menunjukkan bahwa masyarakat “dilibatkan”, padahal tujuan utamanya hanya untuk memperkuat keputusan pengelola. Beberapa warga mengungkapkan bahwa usulan mereka sering tidak ditindaklanjuti, serta rapat yang diadakan lebih banyak bersifat sosialisasi aturan dibandingkan mendengarkan aspirasi. Dalam tingkat ini, posisi masyarakat berada pada tangga partisipatif terendah, karena partisipasi hanya digunakan untuk memperlihatkan legitimasi pengelolaan, bukan memperkuat suara masyarakat.

b) Terapi

Hasil wawancara terhadap tingkat partisipatif planning dalam pengembangan kawasan wista pantai dalegan tahapan non partisipasi, anak tangga ke dua Terapi. 96,66 % menjawab tidak setuju, terhadap pernyataan bahwa semua kebijakan perencanaan pembangunan ditentukan dari pemerintah desa dan hanya beberapa saja rancangan kegiatan yang disampaikan serta tidak ada dialog untuk menanggapi. Dan 3,34 % menyatakan tidak tahu. Dengan demikian dalam pelaksanaan partisipatif desa dalegan draf program-program perencanaan pembangunan oleh pemerintahan desa disampaikan dalam forum partisipatif dan dimusyawarahkan dengan masyarakat.

Tangga ke dua pada anak tangga pertisipasi Arnstein, yaitu terapi mengandung arti Komunikasi masih sangat terbatas atau inisiatif hanya datang dari pemerintah saja (masih satu arah). Dari jawaban responden yang sebagian besar tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, tergambar bahwa dalam pelaksanaan partisipatif desa dalegan sudah ada partipatif masyarakat di dalamnya dengan

adanya dialog dua arah dan semua draf program dan kegiatan perencanaan pembangunan disampaikan kepada masyarakat. Dikaitkan dengan wawancara beberapa pihak. Menurut Bapak Moh. Qolib selaku kepala desa dalegan :

“Kalau semisal ada keluhan dari waraga atau pedagang disana kami segera merevisi denah lapak pedagang setelah menerima keluhan, meskipun ini memerlukan tambahan biaya. Pelatihan kami akan terpisah dan bersifat opsional”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mafudi selaku kordinator kelompok sadar wisata (POKDARWIS):

“Menuntut hak untuk dilibatkan secara substantif dalam perencanaan penempatan lapak pedagang, zona watersport, dan area parkir baru, terutama jika mengancam akses nelayan.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Munafi' selaku pedagang makanan dan Ibu Amawati selaku pedagang baju di Kawasan wisata pantai:

“Kami merasa keluhan kami direspon dengan baik, yaitu diundang kembali untuk negosiasi ulang retribusi, bukan malah disuruh mengubah sikap”

Partisipatif masyarakat sebenarnya tidak benar-benar dilakukan. Masyarakat seolah dilibatkan, tetapi tujuan utamanya bukan untuk mendengarkan pendapat mereka atau memberi ruang pengambilan keputusan, melainkan untuk mengubah sikap masyarakat agar menerima kebijakan pengelola. Dalam konteks Pantai Dalegan, bentuk partisipasi ini terlihat ketika masyarakat hanya diajak dalam kegiatan yang bersifat penghiburan atau pembinaan ringan, seperti sosialisasi singkat, pengarahan sepihak, atau kegiatan yang lebih fokus pada ketertiban dan kepatuhan warga daripada mendengar kebutuhan mereka. Pengelola lebih banyak memberi arahan tanpa membuka ruang dialog, sehingga masyarakat hanya menjadi peserta pasif. Keterlibatan pada level terapi tidak memberikan kekuatan kepada warga untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pengelolaan pantai, melainkan membuat mereka mengikuti kebijakan yang sudah ditentukan.

2) Derajat Semua

a) Memberi informasi

Terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam partisipatif pada tahapan tokenisme pada anak tangga ke tiga Informasi, 96,66 % responden menjawab tidak setuju terhadap pernyataan semua program dan kegiatan perencanaan pembangunan sudah ditentukan dari pemerintah dan semua rancangan kegiatan juga disampaikan tetapi tetap tidak ada dialog untuk menanggapi, dan 3,34 % menjawab setuju.

Informasi merupakan anak tangga ke tiga pada delapan anak tangga partisipasi Arnstain, yaitu Sudah tidak terbatas lagi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tetapi masih bersifat satu arah. Anak tangga informasi berada tingkat tokenisme atau dengan kata lain pertanda atau pencitraan partisipatif. Sesungguhnya penyampaian informasi atau pemberitahuan pada anak tangga ini oleh pemerintah desa adalah suatu bentuk pendekatan kepada masyarakat agar memperoleh legitimasi publik atas segala program yang dicanangkan. pelaksanaan partisipatif di desa dalegan tidak hanya sekedar pencitraan atau

legitimasi publik tetapi pemerintah desa menyampaikan semua informasi mengenai program kegiatan perencanaan pembangunan dan dimusyawarahkan dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Qolib selaku Kepala Desa Dalegan, terkait partisipatif dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

“Jadi Kepala Desa secara konsisten menyampaikan bahwa Pantai Dalega adalah aset bersama milik warga, bukan milik pemerintah atau individu. Hal ini menguatkan tanggung jawab untuk menjaga objek wisata. Apabila terjadi perselisihan kecil misalnya antara pedagang UMKM atau terkait penempatan lapak, Kepala Desa akan melibatkan Dewan Desa atau tokoh masyarakat dalam mencari solusi. Keputusan yang diambil melalui musyawarah ini dianggap lebih adil dan diterima oleh semua pihak karena melibatkan partisipatif konflik secara langsung. Dan untuk dana juga memfasilitasi pelaksanaan dengan mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dasar (gazebo, toilet, fasilitas wisata).”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mafudi selaku kordinator kelompok sadar wisata (POKDARWIS):

“Jadi kegiatan pokdarwis di lingkungan wisata Melakukan pengawasan keamanan (parkir dan keselamatan pantai), menjaga kebersihan lingkungan harian, dan pengelolaan penjualan tiket dan informasi. dan tidak itu juga mbak... POKDARWIS membantu BUMDes dalam mengorganisasi penempatan pedagang kecil dan UMKM warga setempat, menjamin ketertiban dan akses yang adil terhadap peluang usaha. Adapun juga kami masih terlibat langsung sebagai petugas pelayanan pengujung, seperti penjaga tiket, petugas parkir, dan pemandu lokal informal yang memberikan informasi kepada wisatawan. kami juga aktif dalam rapat evaluasi mingguan atau bulanan untuk melaporkan tantangan kegiatan yang dihadapi misalnya...kepadatan parkir, kekurangan air bersih, atau masalah perilaku pengunjung. “

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Munafi' selaku pedagang makanan di Kawasan wisata pantai:

“Jadi kami para pedagang Kami harus disiplin menempati kios yang suda dibangunkan oleh desa BUMDes. Kami tidak boleh memperluas warung atau menempatkan barang dagangan di luar batas yang sudah diizinkan. Kami juga menjaga kualitas dan kehigenisan makanan yang kami jual, bukan itu juga mbak... jadi kami ini menjual produk dengan harga yang wajar dan tidak mengetuk harga wisatawan mekipun itu dari luwars desa atau kota. Biasanya juga ada keluhan dari wisatawan tentang soal toilet kotor atau temapt yang kurang terawat kalau ada keluhan seperti itu kami lapor kepada POKDARWIS. Kalo masalah membantu perkonomian sangat membantu sekali mbak...kalo bukan dari hasil jualan dari mana lagi.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Amawati selaku pedagang Baju dan Mainan di Kawasan wisata pantai:

“Kalo masalah tetentang peraturan di sini tidak terlalu ketat mbak

asalkan kita juga mematuhi peraturan yang ada misalnya di suruh jaga kebersihan buka toko sesuai jam yang sudah di terapkan.... Kalo pendapatan juga tidak nentu mb kapa lagi hari biasa sepi pelanggan apalagi saja jualan baju dan mainan anak jarang juga orang beli.... Kami merasa masih sangat tergantung pada Pemerintah Desa dan BUMDes. Kami hanya bertindak sebagai penyewa dan pelaksana aturan. Belum ada rasa kemandirian untuk mengelola kawasan secara keseluruhan. Harapan saya juga masih tetap sama mbak ingin berjualan tetap di sini tidak ada rolingan dalam satahun sekali. “

Pemberian informasi dalam pengelolaan Pantai Dalegan menunjukkan bahwa masyarakat, pedagang, dan pihak Pokdarwis hanya menerima penjelasan atau pemberitahuan mengenai aturan, kebijakan, serta kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata. Dalam praktiknya, bentuk partisipasi ini bersifat satu arah, karena warga dan pedagang tidak terlibat dalam proses perumusan kebijakan, tetapi hanya diberi informasi setelah keputusan dibuat. Pengelola pantai dan pemerintah desa biasanya menyampaikan informasi melalui rapat, pengumuman, atau komunikasi langsung di lapangan, seperti mengenai jam operasional, kebersihan, penataan pedagang, tarif parkir, atau aturan penggunaan fasilitas. Meskipun informasi disampaikan kepada masyarakat, posisi mereka masih sebagai penerima, bukan sebagai pihak yang memiliki suara dalam pengambilan keputusan.

b) Konsultasi

Tingkat partisipasi masyarakat dalam partisipatif planning pada tahapan tokenisme pada anak tangga ke empat dengan indikator konsultasi yaitu, masyarakat dipersilakan memberikan usulan, walaupun tidak dijamin untuk diterima. Sebagian besar responden yaitu sebanyak 96,66 % menjawab setuju dan 3,34 % menjawab tidak setuju dengan pernyataan masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan usulan pada desa meskipun tidak ada jaminan diterima.

Konsultasi masih berada pada tingkat partisipasi tahapan tokenisme, konsultasi mengandung arti komunikasi sudah bersifat dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi tidak jaminan semua usulan akan direalisasikan oleh pemerintahan desa. Pada tahap ini semua usulan dari semua kelompok masyarakat diterima dan ditampung oleh pemerintah desa. Jadi pelaksanaan partisipatif desa dalegan sampai tingkat partisipatif pada tangga konsultasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Qolib selaku Kepala Desa Dalegan, terkait partisipatif dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

“Pemerintah mengadakan FGD atau rapat kepada masyarakat kecil-kecilan secara terbuka untuk memberikan masukan kepada kami tentang pengelolaan pantai dalegan ini.pemasukan msyarakat sangat pebing bagi pengembangan wisata pantai dalegan ini.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mafudi selaku kordinator kelompok sadar wisata (POKDARWIS):

“Memang kami di diminta untuk memberikan masukan Ketika agenda rapat tetapi meskipun itu belum bisa di jalankan dikarenakan ada kendala tertau atau Cuma di buat pertibangan saja dengan

masukan-masukan lain.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Munafi' selaku pedagang makanan di Kawasan wisata pantai:

“Kami juga sering memberi masukan tersebut Cuma ya kadang tidak di pake mbak, saya biasanya mengusulkan tetang renovasi pantai dan sebagainya Cuma ya sampe saat ini masih belum sepenuhnya karena mungkin ada kendala dari keuangan saya juga tidak tau.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Amawati selaku pedagang Baju dan Mainan di Kawasan wisata pantai:

“Saya sendiri juga ingin mbak kalau kios atau toko setiap penyewa ini di bangun lagi saya juga memberi saran seperti memang di lengarkan dari pihak desa tetapi sampai saat ini juga masih belum di perbarui.”

Pada tahap konsultasi, masyarakat Pantai Dalegan terutama pedagang, dan warga sekitar dilibatkan sebagai pemberi masukan melalui forum diskusi, penyampaian saran, dan keluhan kepada Pokdarwis maupun pengelola pantai. Bentuk konsultasi ini dilakukan lewat rapat bulanan, serta komunikasi langsung di lapangan. Masyarakat dapat menyampaikan persoalan terkait kebersihan, tarif, fasilitas, dan keamanan, namun sifat keterlibatannya masih sebatas didengar, bukan penentu keputusan. Hasil konsultasi menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola, tetapi kontrol akhir tetap berada pada pihak pemerintah desa. Dengan demikian, konsultasi memberi ruang suara kepada warga tanpa memberi kekuasaan langsung, namun tetap berperan penting sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan wisata.

c) Penetraman

Penelitian pada Tingkat partisipatif planning dalam tahapan tokenisme pada anak tangga kelima Penentreman, 96,66 % responden menjawab setuju dan 3,34 % tidak tahu terhadap pernyataan semua usulan diterima, namun usulan tersebut tetap dinilai kelayakannya oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi juga sampai pada anak tangga ke lima yaitu penentreman.

Penentreman masih berada pada tingkat tokenisme, penentreman mengandung arti adanya proses komunikasi yang disertai proses negoisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa semua usulan tidak mungkin untuk direalisasikan, karena terbatasnya sumber daya dan akan dibuat berdasarkan skala prioritas, serta tingkat kewenangan yang berbeda antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Di tahap ini, responden bersikap pasrah dan berharap usulan mereka yang dihasilkan melalui pertemuan rapat dapat diterima dan disetujui. Responden memahami bahwa pihak yang menentukan layak tidaknya usulan tersebut ialah pemerintah desa.

“Kami dari pihak desa menampung usul dari masyarakat dan masyarakat juga menegoisasi ketetuan dari desa selama desa masih mempu menampung usulan tersebut maka desa juga tidak keberatan untuk meyetujui, Tujuan utama kami melibatkan mereka dalam tim adalah untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas proyek. Dengan adanya perwakilan masyarakat di meja rapat, kita dapat memastikan tidak ada

protes atau penolakan di lapangan, karena mereka adalah jembatan antara kebijakan dan warga.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mafudi selaku kordinator kelompok sadar wisata (POKDARWIS):

“Kehadiran kami di sana berfungsi untuk menenangkan masyarakat bahwa suara mereka sudah terwakili, meskipun kekuatan kami terbatas. Kami berharap ke depannya kami bisa mencapai Kemitraan sejati, di mana suara masyarakat benar-benar menjadi penentu.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Munafi' selaku pedagang makanan di Kawasan wisata pantai:

“Kami sebagai pedagang menghargai niat baik Pemerintah Desa yang sudah menyertakan perwakilan kami dalam rapat penataan kawasan. perwakilan kami disana sebagai saksi bahwasanya ada ketetapan baru atau ketetapan yang sudah ada di kawasan wisata.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Amawati selaku pedagang Baju dan Mainan di Kawasan wisata pantai:

“Kami juga baru tau kalau ada kegiatan baru atau perubahan kegiatan saat rapat semisal kalau kita tidak diajak rapat kita tidak tahu,mkanya kami memberikan masukan meskipun itu kadang diabaikan saja.”

Pada wawancara ini menyimpulkan bahwa penetraman pada pengelolaan Pantai Dalegan menggambarkan kondisi ketika masyarakat hanya berada pada posisi sebagai penerima aturan dan instruksi dari pengelola atau pemerintah desa. Pada tahap ini, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, pemeliharaan, ataupun evaluasi secara langsung, melainkan hanya mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan bagi mereka. Di Pantai Dalegan, bentuk penetraman terlihat ketika warga, pedagang, dan pengunjung hanya diminta menaati aturan kebersihan, jam operasional, lokasi berdagang, atau ketentuan keamanan tanpa dilibatkan dalam penyusunan kebijakan tersebut. Peran Pokdarwis dalam penetraman juga berfungsi sebagai pengawas yang menyampaikan perintah atau arahan dari pengelola kepada masyarakat, bukan sebagai forum dialog dua arah. Meskipun masyarakat tetap terlibat dalam kegiatan sehari-hari seperti menjaga kebersihan dan ketertiban area pantai, keterlibatan ini bersifat pasif karena kegiatan tersebut dilaksanakan atas instruksi, bukan atas inisiatif bersama atau keputusan partisipatif. Dengan demikian, penetraman menunjukkan bahwa hubungan pengelola dengan masyarakat lebih bersifat top-down, belum mengarah pada proses kemitraan atau pemberdayaan yang setara.

3) Kekuatan masyarakat

a) Kemitraan

Hasil wawancara terhadap tingkat partisipatif planning pada tingkat kekuasaan masyarakat pada anak tangga keenam Kemitraan, 100 % responden setuju terhadap pernyataan masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama merancang dan melaksanakan kegiatan dalam pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa antara pemerintah desa dengan masyarakat merupakan mitra sejajar.

Kemitraan merupakan anak tangga ke 6 dan sudah masuk pada tangga

terbawah pada tahapan kekuasaan masyarakat. Tingkat partisipasi kemitraan menggambarkan kondisi adanya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat yang berposisi mitra sejajar. Pemerintah desa dan masyarakat bekerja sama baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Qolib selaku Kepala Desa Dalegan, terkait partisipatif dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

“Pantai Dalegan ini menjadi sumber ekonomi bagi warga, jadi kami selalu mendorong masyarakat ikut menjaga dan merawat pantai. Setiap bulan kami mengadakan rapat evaluasi di balai desa untuk menampung keluhan pedagang, nelayan, dan warga sekitar. Kami ingin pengelolaan pantai dilakukan bersama. Dalam pemeliharaan, warga cukup aktif. Setiap minggu ada kerja bakti, dan kalau ada fasilitas rusak seperti toilet atau lampu, warga langsung melapor ke kami atau ke pengelola pantai. Kami juga berkoordinasi dengan Pokdarwis supaya kegiatan kebersihan tetap berjalan.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mafudi selaku kordinator kelompok sadar wisata (POKDARWIS):

“Peran kami di Pokdarwis itu lebih ke memastikan pantai tetap bersih dan tertata. Kami mengajak warga untuk kerja bakti, terutama setelah akhir pekan karena sampah lebih banyak. Kami juga menyiapkan tempat sampah tambahan yang diletakkan di area ramai pengunjung. Kalau ada fasilitas seperti gazebo atau papan informasi yang rusak, kami biasanya cek dulu lalu melapor ke pengelola supaya diperbaiki. Pokdarwis juga bertugas mengingatkan pedagang agar menjaga kebersihan dan kenyamanan wisata. Meskipun ada tugas kebersihan di Kawasan wisata pantai tetapi kita masih menjalankan kerja bakti. “

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Munafi' selaku pedagang makanan di Kawasan wisata pantai:

“Sebagai pedagang yang setiap hari di pantai, saya merasa ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan. Kalau pagi sebelum buka jualan, saya biasanya bersihkan sekitar lapak saya dulu. Kalau sampah menumpuk, kami para pedagang biasanya bekerja sama bersihkan supaya pantai tetap enak dilihat. Kami juga sering komunikasi dengan Pokdarwis, terutama kalau ada kegiatan bersih-bersih. Biasanya mereka kasih tahu lewat grup WhatsApp untuk ikut kerja bakti. Apalagi mbak saya penjual makanan dan minuman pasti harus selalu bersih kalo ngga di bersihkan banyak lalat jadi kalau kelihatan seperti itu kan pembeli juga tidak mau.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Amawati selaku pedagang Baju dan Mainan di Kawasan wisata pantai:

“Keluhan yang terjadi juga sama mbak seperti pedagang lain jadi kalau semisal patai atau Kawasan wisata di sini kotor orang-orang juga malas untuk berkunjung. Kurang lebih kita juga ikut bersih di area kawas ini kalau tempat ini bersih kan juga enak.”

Kemitraan dalam pengelolaan Pantai Dalegan terlihat dari adanya kerja sama antara Pemerintah Desa, Pokdarwis, para pedagang, dan warga sekitar dalam menjaga, mengelola, serta memperbaiki kawasan wisata. Bentuk kemitraan ini tampak dari pembagian peran yang jelas: pemerintah desa menyediakan kebijakan dan dukungan fasilitas, Pokdarwis mengatur kegiatan operasional dan koordinasi harian, sementara pedagang dan warga ikut menjaga kebersihan, melapor kerusakan, serta memberikan masukan dalam rapat evaluasi bulanan. Semua pihak bekerja secara setara sebagai rekan kerja, saling mendukung agar pelayanan wisata lebih baik, lingkungan tetap bersih, dan keamanan pengunjung terjaga. Meski keputusan strategis masih berada pada pemerintah desa, masukan dan tindakan dari Pokdarwis dan masyarakat menjadi dasar utama pengambilan keputusan. Kemitraan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pantai Dalegan tidak berjalan sepihak, tetapi dilakukan melalui kolaborasi aktif yang memperkuat keberlanjutan wisata berbasis komunitas.

b) Kekuasaan Delegatif

Hasil wawancara terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam partisipatif pada tingkat kekuasaan masyarakat pada anak tangga ketujuh Pelimpahan Kekuasaan, dengan indikator yaitu pemerintah memberikan kewenangan dalam merancang, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan desa, masyarakat diberi tanggung jawab penuh. Pada tangga ke tujuh ini, 63,34 % responden menjawab tidak setuju, 30 % setuju dan 6,66 % tidak tahu, atas pernyataan pemerintah memberikan kewenangan dalam merancang, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan desa, masyarakat diberi tanggung jawab penuh. Dari 63,34 % responden yang menjawab tidak setuju, maka dapat disimpulkan tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang desa Maburai belum sampai pada tingkat pelimpahan kekuasaan.

Pelimpahan Kekuasaan merupakan tingkat tingkat partisipasi pada tangga ke tujuh. Yang berarti pemerintah telah memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengurus sendiri kebutuhan dan kepentingannya dalam hal pelayanan publik. Pelimpahan kekuasaan (delegated power) berada pada derajat kekuasaan masyarakat (citizen power).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Qolib selaku Kepala Desa Dalegan, terkait partisipatif dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

“Kami secara resmi telah mengambil alih kendali penuh dalam penentuan tarif retribusi, manajemen penataan lapak, dan regulasi ketertiban di kawasan Pantai Dalegan. karena ini kekuasaan dan tanggung jawab yang besar Kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas ini secara transparan, profesional, dan akuntabel kepada seluruh warga Desa Dalegan, bukan hanya kepada Pemerintah Desa.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mafudi selaku kordinator kelompok sadar wisata (POKDARWIS):

“Dana yang terkumpul dari retribusi kini langsung diinvestasikan pada perbaikan infrastruktur yang kami butuhkan, seperti tambahan akses air bersih dan perbaikan tenda, karena keputusan alokasi dana dibuat oleh komite yang memahami masalah harian kami, kami juga

memiliki hak untuk bertindak lebih tegas menertibkan dan membatasi pedagang musiman atau pedagang besar dari luar daerah yang mengganggu stabilitas pasar kami.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Munafi' selaku pedagang makanan di Kawasan wisata pantai:

“Kami juga mampu mengelola pantai ini dengan baik apalagi dengan cara kita sendiri tidak mungkin mbak kamis selalu pedagang di sini mengotori atau merusak fasilitas yang ada di sini kalo semisal terjadi seperti itu jualan kami juga ikut terkena dampaknya juga..”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Amawati selaku pedagang Baju dan Mainan di Kawasan wisata pantai:

“Kadang juga pengelola pantai menanyakan kami mbak...septi apa yang kurang dan mana yang mau diperbaiki ya sama seperti rapat tdi kami selaku pedagang juga diajak suapa kita para pedagang tau adaperaturan baru atau peraturan lama yang akan di pakai lagi.”

Kekuasaan delegatif dalam pengelolaan Pantai Dalegan menggambarkan kondisi ketika sebagian kewenangan pengelolaan sudah diberikan kepada masyarakat, tetapi pengawasan utama tetap berada pada pengelola resmi. Wawancara pedagang dan Pokdarwis menunjukkan bahwa mereka memiliki peran aktif dalam mengontrol kondisi lapangan, memberi teguran kepada pengunjung, dan menyampaikan laporan kerusakan atau masalah. Pedagang merasa diberi kepercayaan mengelola area jualannya dan menjaga lingkungan sekitar, sedangkan Pokdarwis diberi wewenang mengoordinasi kebersihan dan kegiatan pengunjung. Sementara warga memiliki ruang untuk memberi masukan dan mengontrol kinerja Pokdarwis melalui teguran dan evaluasi.

c) Kontrol Warga

Pada tahapan ini, 86,66 responden menjawab tidak setuju dan 13,34 %, responden setuju atas pernyataan masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama. Pada tahapan ini Peran masyarakat lebih besar dibandingkan peran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang desa Maburai tidak sampai pada tingkat kontrol masyarakat.

Kontrol masyarakat diartikan sebagai masyarakat dapat terlibat aktif dalam hal perencanaan, implementasi, evaluasi dan kontrol setiap kebijakan publik yang dibuat. Control masyarakat merupakan anak tangga tertinggi dalam depaan tangga partisipasi Arnstein, merupakan derajat Kekuasaan Masyarakat (citizen power). Pada dua anak tangga teratas (delegated power dan citizen control) dalam kelas citizen power, masyarakat memiliki suara mayoritas dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Qolib selaku Kepala Desa Dalegan, terkait partisipatif dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

“Iya mbak, kami telah mengalihkan seluruh kekuasaan pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, dan penentuan regulasi operasional Pantai Dalegan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Komite Pengelola yang sepenuhnya diisi dan dikendalikan oleh warga.kami juga memastikan (BUMDes) beroprasi sesuai koridor

hukum dan memberikan pendampingan jika diperlukan masalah perizinan atau birokrasi yang lebih tinggi. Pemerintah desa kini berfungsi sebagai pendukung masyarakat juga.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mafudi selaku kordinator kelompok sadar wisata (POKDARWIS):

“Dalam banyak hal, masyarakat sebenarnya punya peran besar. Kami dari Pokdarwis hanya sebagai penggerak. Jadi kalau mereka memberi kritik atau mengawasi, kami anggap itu bentuk kepedulian. Kami selalu terbuka menerima masukan Setiap bulan ada pertemuan kecil, semacam evaluasi bersama warga kan mbak...jadi warga juga bebas untuk memberikan masukan kepada kami.”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Munafi' selaku pedagang makanan di Kawasan wisata pantai:

“Kami di sini mbak...bukan Cuma fokus jualan saja tapi kami juga menjaga kawasan wisata pantai disni dan menjaga kebersihan dan keamanan juga”

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Amawati selaku pedagang Baju dan Mainan di Kawasan wisata pantai:

“Kalau soal kegiatan Pokdarwis mbak...warga biasanya ikut mengingatkan kalau ada hal yang kurang atau perlu diperbaiki. Misalnya kalau sampah menumpuk atau ada fasilitas yang rusak, kami para pedagang sering menyampaikan langsung kepada anggota Pokdarwis yang jaga. Pokdarwis biasanya menerima masukan itu dengan baik dan menindaklanjuti ke pengelola.”

Berdasarkan berbagai wawancara dengan Pokdarwis, pedagang makanan, pedagang baju/mainan, dan warga sekitar Pantai Dalegan, dapat disimpulkan bahwa kontrol warga terhadap Pokdarwis sudah ada, tetapi masih bersifat informal dan belum kuat. Warga sebenarnya cukup aktif dalam memberikan masukan kepada Pokdarwis, terutama terkait kebersihan, keamanan, kenyamanan pengunjung, serta penataan pedagang. Mereka menyampaikan kritik atau saran secara langsung ketika melihat masalah, misalnya sampah yang menumpuk, fasilitas rusak, atau ketika pengunjung tidak tertib. Pedagang yang setiap hari berada di lokasi sering kali menjadi pihak pertama yang mengingatkan atau menyampaikan protes kepada Pokdarwis, karena mereka merasa sangat terdampak bila kondisi pantai tidak terjaga.

pembahasan

Pembahasan penelitian ini berfokus terhadap partisipatif planning pada pengembangan Kawasan wisata pantai dalegan Gresik, menggunakan teori Sherry Arnsten Dalam Partisipatif Palining, pendekatan teori Sherry Arnsten masih belum sepenuhnya berjalan secara Partisipatif Planning untuk menganalisis efektivitas program ini. Teori ini menekankan pentingnya 8 indikator dan di bagi menjadi 3 tangga partisipatif dalam keberhasilan Partisipatif Planning, seperti kejelasan standar dan tujuan program, menilai tingkat keterlibatan masyarakat, mengidentifikasi kualitas partisipatif, menentukan posisi partisipatif perencanaan saat ini, memberikan rekomendasi perencanaan yang lebih partisipatif, membantu mengembangkan wisata berkelanjutan. setelah melakukan penelitian dengan

wawancara di lapangan diperoleh sejumlah temuan yang menunjukkan bahwa:

Non-Participation Planning pada Pengembangan Wisata Pantai Dalegan

Menurut Sherry Arnstein, tingkat paling rendah dalam partisipatif masyarakat disebut Non-Participation atau Tidak Partisipatif, yang terdiri dari Manipulation (manipulasi) dan Therapy (terapi). Pada level ini masyarakat tidak benar-benar dilibatkan dalam proses perencanaan, melainkan hanya dijadikan objek untuk mendukung keputusan yang sudah ditetapkan oleh pengelola atau pemerintah. Dalam konteks pengembangan kawasan wisata Pantai Dalegan Gresik, bentuk manipulasi dapat terlihat ketika masyarakat hanya diundang dalam sosialisasi tanpa kesempatan menyampaikan pendapat, sehingga keterlibatan mereka bersifat simbolis. Sementara itu, therapy muncul ketika masyarakat diberi penyuluhan atau pembinaan semata-mata agar menerima kebijakan yang sudah jadi, bukan diajak merancang pengembangan pantai bersama, informing muncul Ketika masyarakat hanya diberi informasi mengenai rencana, kebijakan, atau program yang telah ditentukan, tanpa kesempatan untuk berpendapat atau terlibat dalam proses perencanaan. Pada tahap ini, komunikasi bersifat top down, artinya masyarakat hanya menjadi penerima informasi, bukan peserta aktif. Dengan demikian, tingkat tidak partisipatif menurut Sherry Arnstein menunjukkan bahwa proses perencanaan Pantai Dalegan belum mencerminkan perencanaan partisipatif yang sesungguhnya, karena masyarakat belum memiliki pengaruh atau suara nyata dalam menentukan arah pengembangan wisata.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan di kawasan wisata Pantai Dalegan Gresik, kondisi ini tampak pada beberapa aspek pengelolaan dan perencanaan. Pada kategori (manipulasi), masyarakat sering hanya diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi, namun tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat atau terlibat dalam perumusan keputusan. Undangan kepada masyarakat lebih bersifat formalitas untuk menunjukkan seolah ada keterlibatan, padahal keputusan mengenai pengembangan fasilitas, pengaturan area pantai, atau program wisata telah ditentukan sebelumnya oleh pengelola atau pemerintah desa. Sementara itu, pada kategori (therapy), temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lebih sering menjadi objek pembinaan atau penyuluhan, seperti edukasi mengenai kebersihan pantai atau arahan terkait aktivitas wisata, tetapi mereka tidak dilibatkan dalam merancang sistem pengelolaan, penyelesaian masalah, maupun evaluasi program wisata. Pembinaan tersebut cenderung bertujuan agar masyarakat mengikuti kebijakan yang sudah dibuat, bukan untuk meningkatkan kemampuan mereka berpartisipasi secara nyata.

Penelitian ini memperkuat bahwa ketidakpartisipatifan tersebut berdampak pada rendahnya rasa memiliki terhadap kawasan wisata, kurangnya efektivitas pengelolaan, dan munculnya ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, peneliti menegaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas pengembangan Pantai Dalegan, perlu ada pergeseran dari pola tidak partisipatif menuju pola partisipatif di mana masyarakat betul-betul dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penguatan ini menegaskan bahwa keberhasilan wisata sangat bergantung pada partisipasi lokal yang bermakna, bukan sekadar formalitas.

Partisipatif Simbolis dalam Perencanaan Wisata Pantai Dalegan

Degrees of Tokenism atau derajat semua adalah tahap partisipasi di mana masyarakat tampak dilibatkan, tetapi tidak memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Bentuknya terdiri dari Informing, Consultation, dan Placation. Pada tahap Informing, masyarakat hanya menerima informasi mengenai rencana pengembangan tanpa ruang dialog, sehingga komunikasi berjalan satu arah. Pada Consultation, masyarakat dimintai pendapat melalui musyawarah atau survei, tetapi pendapat itu tidak harus digunakan atau tidak memengaruhi keputusan yang sudah dipersiapkan oleh pihak berwenang. Sementara pada Placation, beberapa wakil masyarakat diikutsertakan dalam forum atau pertemuan, namun kewenangan mereka sangat terbatas sehingga keputusan strategis tetap berada pada pemerintah atau pengelola. Secara keseluruhan, tokenism menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat hanya bersifat formal atau simbolis. Mereka hadir dan didengar, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengubah arah rencana atau kebijakan. Akibatnya, proses pembangunan yang mengklaim "melibatkan masyarakat" sebenarnya belum memberikan ruang kontrol atau kekuasaan bagi warga untuk mempengaruhi perencanaan secara substansial.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Pantai Dalegan masih berada pada Derajat Semu (Degrees of Tokenism) menurut Sherry Arnstein, yang mencakup Informing, Consultation, dan Placation. Meskipun proses pengembangan wisata tampak melibatkan masyarakat, kenyataannya keterlibatan tersebut masih bersifat formalitas dan belum memberikan kekuasaan nyata kepada masyarakat lokal untuk mempengaruhi arah kebijakan maupun keputusan strategis. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa model partisipasi yang diterapkan masih jauh dari prinsip *citizen power* atau pemberdayaan masyarakat. Derajat semu membuat masyarakat tidak dapat memengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol pengembangan wisata, sehingga potensi mereka belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini berpengaruh pada kurangnya rasa memiliki, rendahnya efektivitas kebijakan, dan minimnya keberlanjutan pengelolaan. Dengan demikian, kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa pengembangan Wisata Pantai Dalegan memerlukan peningkatan partisipasi menuju tingkat yang lebih tinggi, yaitu kemitraan seajar dan pemberdayaan masyarakat. Hanya melalui pelibatan yang nyata dan bermakna, pengembangan wisata dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

Partisipasi Berdaya dalam Perencanaan Pengembangan Wisata Pantai Dalegan

Tingkatan kekuatan masyarakat (*Citizen Power*) dalam teori Sherry Arnstein menggambarkan kondisi ketika masyarakat memiliki peran nyata dan berpengaruh dalam perencanaan. Pada tahap (Partnership), masyarakat bekerja setara dengan pemerintah melalui negosiasi dan berbagi tanggung jawab. Pada tahap (Delegated Power), sebagian kewenangan penting diserahkan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menentukan kebijakan tanpa bergantung penuh pada pemerintah. Pada tingkat tertinggi, (*Citizen Control*), masyarakat memegang kendali penuh atas perencanaan dan pengelolaan wilayah, sementara pemerintah hanya berperan sebagai pendamping. Ketiga tingkat ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadi

subjek utama yang memiliki kekuatan dalam menentukan arah pengembangan suatu kawasan.

Berdasarkan hasil penelitian di Pantai Dalegan, tingkat kekuatan masyarakat (Citizen Power) dalam tangga partisipasi Sherry Arnstein belum sepenuhnya tercapai, namun beberapa unsur ke arah tersebut mulai terlihat. Pada level kemitraan (Partnership), sebagian masyarakat terutama kelompok pedagang dan pengelola parkir mulai dilibatkan dalam pengaturan teknis seperti kebersihan, penataan lapak, dan operasional harian, meskipun belum memiliki posisi setara dalam pengambilan keputusan strategis. Bentuk pendeklegasian kewenangan (Delegated Power) masih terbatas, karena keputusan besar seperti pembangunan fasilitas, penataan kawasan, dan kebijakan tiket tetap didominasi pemerintah desa dan pengelola resmi. Adapun tingkat (Citizen Control) belum tampak, karena masyarakat belum memiliki kontrol penuh terhadap arah pengembangan wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa peran masyarakat sudah mulai bergerak ke arah pemberdayaan, namun belum mencapai tingkat kekuatan masyarakat yang ideal menurut teori Sherry Arnstein.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Partisipatif Planning pada Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Dalegan Gresik, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengembangan kawasan wisata masih belum sepenuhnya berjalan secara partisipatif, berdasarkan teori Sherry Arnstein, meskipun telah menunjukkan beberapa upaya melibatkan masyarakat. Bentuk partisipasi yang muncul lebih banyak berada pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan, sementara keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan awal, pengambilan keputusan, dan evaluasi masih rendah. Pengelola pantai, pemerintah desa, dan pelaku usaha lokal sebenarnya telah memiliki komitmen untuk melibatkan masyarakat, namun mekanisme partisipasi yang terstruktur belum sepenuhnya diterapkan. Akibatnya, aspirasi masyarakat belum tergali secara optimal dan belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan pengembangan pantai. Meski begitu, partisipasi masyarakat tetap memberikan kontribusi nyata terhadap keberlangsungan wisata, terutama melalui keikutsertaan dalam menjaga kebersihan pantai, menyediakan layanan wisata, serta mendukung aktivitas ekonomi lokal. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, potensi pengembangan Pantai Dalegan menuju destinasi wisata yang lebih tertata, berkelanjutan, dan berbasis komunitas sangat terbuka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan model perencanaan partisipatif, termasuk forum musyawarah rutin, peningkatan kapasitas masyarakat, transparansi informasi pengelolaan, serta kolaborasi lebih erat antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat. Upaya ini penting agar pengembangan Pantai Dalegan dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abady, A. P. (2020). Perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1).
- Aini, E. (n.d.). *Prospek Dan Upaya Pengembangan Pariwisata Wisata Pasir Putih (Wpp) Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*.

- Akbar, I. (2023). Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Lokal: Studi Di Kota Bandung. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 5(2), 101–108.
- Akbar, R. A., Fauzan, M., Arsyad, A. A. J., & Barki, K. (2023). Implementasi pendekatan community empowerment untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 65–76.
- Amawati. (2025). *Wawancara dengan pedagang Baju dan Mainan di Kawasan wisata pantai*.
- Amir, A., Sukarno, T. D., & Rahmawati, F. (2020). Identifying Potential and Development Status of Tourism Village Development in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(2), 84–98.
- Arbayah, S., & Suparti, H. (2020). Level Of Community Participation In Development Planning Deliberations In Maburai Village, Murung Pudak District, Tabalong Regency. *PubBis*, 6(1), 39–48.
- Arbayah, S., & Suparti, H. (2022). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 6(1), 39–48.
- Arifudin, M., Sholeha, F. Z., & Umami, L. F. (2021). Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), 162–183.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Bahar, W. S. (2016). *Pengembangan kawasan wisata alam berbasis partisipasi masyarakat di kecamatan Panceng kabupaten Gresik*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Baiquni, M., Wachyuni, S. S., Hermina, S., Afriansari, D. N., Dzulkifli, M., Hanggraito, A. A., Madyaningrum, I. R., & Damasdino, F. (2024). *Bertahan dan Bangkit Bersama: Pariwisata dalam Pusaran Badai Pandemi Covid-19*. UGM PRESS.
- Bintoro, R. S., Widagdo, S., Subur, J., & Prihatiningtyas, S. (2022). Hidro-Oseanografi Sebagai Sarana Bantu Dalam Zonasi Di Wisata Pasir Putih Dalegan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pesisir*, 31–38.
- Brata, J. T., Djauhar, A., & Yuningsih, N. K. E. (2022). Model Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 37–46.
- Cahyaningrum, D., Hasani, T. D., Asri, N., Safitri, D., & Ibrahim, I. D. K. (2024). The role of community participation toward economic empowerment in the tourism sector. *West Science Business and Management*, 2(04), 1150–1158.
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural development participation: concepts and measures for project design, implementation and evaluation*.

- Daud, R. F., & Novrimansyah, E. A. (2022). Strategi komunikasi pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal pada daerah wisata di Provinsi Lampung. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(2), 13–28.
- Elim, Y. V., & Mba, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Pariwisata Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2019. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9(1), 23–32.
- Febrian, A. W., & Perdana, M. A. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pantai Cemara Banyuwangi. *Tourism, Hospitality And Culture Insights Journal*, 3(1), 58–66.
- Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui: Faktor Pengaruh dan Tantangan. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 112–129.
- Indayani, L., & Andriani, D. (2021). Pengantar manajemen. *Umsida Press*, 1–130.
- Julyanti, J., Syarifuddin, S., & Rahmawati, R. (2023). Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Wisata Pantai Ketapang Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 1(2), 128–136.
- Kota, P. W. dan. (n.d.). *Hubungan Antara Karakteristik Masyarakat Dengan Bentuk Partisipasi Pada Pelestarian Pusaka Studi Kasus: Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya*.
- Mafudi. (2025). *Wawancara pribadi dengan kordinator kelompok sadar wisata (POKDARWIS)*.
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e-musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 95–115.
- Manghayu, A. (2021). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e-musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 95–115.
- Maujud, F. (2017). Peran partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah (studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah Islahul Mutu'allim Pagutan Kota Mataram). *Palapa*, 5(2), 92–121.
- Moleong, L. J. (2007). A. Jenis dan Pendekatan Penelitian. *Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo*, 1.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodekalaugi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. bandung: remaja rosdakarya.
- Munafi'. (2025). *Wawancara pedagang makanan di Kawasan wisata pantai Dalegan*.
- Ngongare, A., Rompas, W., & Kiyai, B. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(73).
- Octaningrum, A., Zuniati, A. R., & Aulia, H. N. (2025). Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pintareng, Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1).
- Paul, S. (1987). Community participation in World Bank projects. *Finance and Development*, 24(4), 20.

- Puspaningrum, O. L. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Pantai Gedo Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 4(1), 1–21.
- Puspitasari, A. W. D., & Rahmawati, F. (2022). Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Jabung melalui program desa sejahtera mandiri. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 2(5), 545–552.
- Putra, I. P. (2024). *Kontestasi Aktor Dalam Tata Kelola Wisata Bahari: Studi Di Pantai Dalegan, Gresik Actor Contestation In Marine Tourism Governance: A Study On Dalegan Beach, Gresik*.
- Qolib, M. (2025). *Wawancara pribadi tentang partisipasi masyarakat desa Dalegan dengan Kepala Desa Dalegan*.
- Rahayu, E., & Suroso, A. (2020). Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan*.